

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam suatu kegiatan usaha, suatu perusahaan/instansi mempunyai tujuan tertentu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya banyak faktor yang perlu diperhatikan, salah satunya sumber daya manusia, yang dapat diartikan sebagai pekerja dan pegawai yang ikut menunjang dalam menggapai tujuan instansi. Setelah karyawan memberikan tenaganya dalam pencapaian tujuan, maka pihak instansi wajib untuk memberikan gaji kepada tenaga kerjanya. Instansi pemerintah yang ada di kabupaten Buleleng yang menangani pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yaitu Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Instansi ini merupakan instansi penunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah pada bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dimana salah satu tugasnya yaitu melayani pengelolaan penggajian baik pegawai ASN maupun Non ASN dari setiap SKPD yang ada di kabupaten Buleleng, khususnya penanganan pengelolaan gaji pegawai ASN dan Non ASN yang ada di BPKPD itu sendiri. Selama ini berdasarkan pengamatan awal penanganan pengelolaan gaji pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sudah dapat

memanfaatkan teknologi informasi perangkat daerah yang ada yaitu dengan penggunaan pengelolaan keuangan daerah ke dalam sistem informasi yang terkomputerisasi. Berdasarkan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis Elektronik disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Maka berdasarkan peraturan tersebut sistem informasi yang diterapkan di BPKPD yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dimana SIPD ini merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan penggajian dibutuhkan suatu sistem karena pemberian gaji merupakan transaksi yang rutin dilakukan setiap bulannya. Gaji pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan kepada perusahaan. Menurut Mulyadi (2014:373), gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan administrasi atau yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang pada umumnya dibayarkan secara tetap perbulan. Pada dasarnya implementasi penggajian pegawai/karyawan seharusnya dilaksanakan secara profesional supaya muncul hubungan yang baik antara instansi dengan pegawainya, selain itu juga terkait pada penyelenggaraan kesejahteraan atau ketentraman para pegawai maka harus diperhatikan secara spesifik oleh dinas pemerintahan ataupun perusahaan dalam hal untuk menggapai sasaran organisasi tersebut. Sehingga kewajiban dan hak bisa berjalan beriringan satu sama lain.

Masalah penggajian umumnya merupakan masalah yang paling kompleks dan merupakan salah satu komponen yang paling penting bagi instansi pemerintahan ataupun perusahaan. Sehingga instansi pemerintahan ataupun perusahaan harus mengikuti perkembangan IPTEK dalam pengelolaan gajinya. Dimana salah satu perkembangan yang paling penting adalah semakin diperlukannya pemakaian alat pengolahan data yang dapat berfungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh instansi maupun perusahaan. Alat pengolah data yang paling berperan penting adalah komputer, dimana komputer ini sebagai perangkat pengolah data sehingga semua jenis transaksi penggajian yang ada baik di instansi maupun di perusahaan dapat terkomputerisasi dan tersimpan dengan baik.

Untuk menjalankan perannya sebuah komputer memerlukan suatu sistem yang akan membantu perannya, maka dalam hal ini dibutuhkan suatu sistem informasi akuntansi guna untuk menunjang pengelolaan penggajian yang ada pada instansi pemerintahan ataupun perusahaan. Azhar Susanto (2013:72) menjelaskan bahwa kelompok dari sub bagian yang berbentuk fisik atau bukan yang berkaitan satu sama lain dan beroperasi secara serempak dalam pengolahan kegiatan yang terkait dengan permasalahan finansial dan menjadi informasi keuangan disebut sistem informasi akuntansi. SIA merupakan gabungan dari kemampuan yang tercipta dalam mengubah data menjadi informasi yang akan disebar ke beberapa penggunanya. Dan juga sebagai sumber yang menyediakan informasi keuangan yang banyak diperlukan bagi pihak-pihak dari perusahaan maupun instansi tersebut.

Sistem akuntansi penggajianlah yang dipakai dalam pengelolaan gaji dalam SIA. Menurut Mulyadi (2014:407), sistem informasi akuntansi penggajian adalah

digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan. Dimana sistem penggajian ini terdiri dari suatu kerangka kerja yang saling berhubungan dalam suatu perusahaan yang berguna untuk menginformasikan data biaya yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan pada perusahaan. Alur kerjanya mulai dari memasukkan data, menyimpan, mengolah, menghasilkan dan pengendalian.

Menurut Mulyadi (2001:375), bagi instansi sistem ini sangat penting karena berguna dalam menghindari adanya kesalahan, penyimpangan atau pengeluaran yang sifatnya fiktif yang bisa menimbulkan kerugian. Sistem akuntansi penggajian ini dibuat atau dirancang guna untuk menangani transaksi perhitungan gaji pegawai serta pembayarannya. Dalam peeninputan gaji pegawai baik pegawai ASN maupun pegawai Non ASN dibutuhkan dokumen-dokumen pendukung seperti kwitansi, daftar gaji, dan lainnya. Dilihat dari sangat pentingnya sistem informasi penggajian ini maka harus diterapkan pada instansi-instansi pemerintahan khususnya yang menangani pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan pembayaran gaji pegawai maka perlu adanya suatu sistem akuntansi penggajian yang terkoordinasi dan yang efektif dan efisien, maka berdasarkan pengamatan awal yang dilihat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penggajian yang digunakan sebagai input utama dalam proses peeninputan transaksi gaji masih belum sesuai dengan harapan terkait ketepatan waktu pencairan gaji pegawai yang ada di BPKPD. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jauh dan lebih detail tentang penerapan sistem informasi akuntansi khususnya mengenai

penggajian pegawai ASN dan Non ASN serta dokumen-dokumen pendukung pengajuan gaji pegawai yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, maka dari penjabaran yang ada peneliti mengangkat judul **“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai ASN dan Non ASN Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sehingga yang menjadi pokok permasalahannya yaitu Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai ASN dan Non ASN Pada BPKPD Kabupaten Buleleng?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai ASN dan Non ASN Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

## **1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu :

a. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini menjadi salah satu peluang yang berguna dalam memperbanyak pemahaman serta pengetahuan berharga pada penerapan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan tentang Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. Penulis bisa mengetahui tentang penerapan SIA Penggajian yang terdapat di BPKPD.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun peneliti lainnya, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah mengenai Sistem Informasi Akuntansi Penggajian.

c. Bagi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide yang terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai ASN dan Non ASN Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.